

# **RESUME**

## **JUDUL SKRIPSI**

**KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENINGKATKAN  
ALIRAN FDI (*Foreign Direct Investment*) DI TENGAH ANCAMAN  
KRISIS EKONOMI GLOBAL TAHUN 2008**



**DISUSUN OLEH**

**GAFUR DJALI**

**151050018**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"  
YOGYAKARTA  
2012**

## ABSTRAK

Krisis ekonomi AS dan resesi ekonomi global ternyata tidak berdampak negatif terhadap perkembangan arus investasi asing langsung (FDI) di Indonesia pada tahun 2008. Realisasi investasi asing langsung (FDI) di Indonesia pada tahun 2008 tumbuh positif dikarenakan ketepatan pemerintah dalam mengantisipasi dampak resesi global sehingga menghadirkan sentiment positif investor untuk tetap merealisasikan investasinya di Indonesia. Pemerintah juga mampu memberi kepastian hukum yang pro-pasar (investasi) dan menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri, sehingga para investor yakin untuk merealisasikan investasinya atau tetap memilih berinvestasi di Indonesia.

Kata kunci: Kebijakan pemerintah, FDI (*foreign direct investment*), krisis ekonomi global, krisis finansial, investasi asing, kredit perumahan (*subprime mortgage*),

Tahun 2008 adalah tahun berat dalam perekonomian dunia. Diwarnai dengan beberapa hal fundamental dalam ekonomi seperti (Fruktuasi harga komoditi primer) kenaikan harga minyak, krisis pangan, dampak pemanasan global, dan krisis keuangan AS (Amerika Serikat). Titik kulminasi terjadi pada krisis AS, krisis ini kemudian menjelma menjadi krisis keuangan global. Namun, dari kesemua aspek di atas krisis keuangan AS yang menghadirkan kepanikan bersama baik pada level negara maupun pelaku usaha secara global. Hal tersebut dikarenakan ekonomi AS menyumbang 25% dari total produk domestik bruto dunia. Sehingga penurunan ekonomi AS dapat memberikan dampak negatif bagi perkembangan ekonomi global secara menyeluruh.

Hal tersebut memberikan sinyal (indikator) akan adanya penurunan pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh disegala bidang terutama sektor finansial dan sektor riil. Tidak terkecuali akan berdampak pula pada arus pertumbuhan investasi asing langsung (FDI) di Indonesia selama kurun waktu 2008. Berdasar situasi tersebut banyak pihak yang pesimis terhadap perkembangan ekonomi terutama perkembangan investasi asing langsung di Indonesia tahun 2008. Perekonomian Indonesia tahun 2008 secara umum mengalami penurunan, menurut laporan tahunan yang dikeluarkan BI (Bank Indonesia) Pertumbuhan ekonomi tahun 2008 turun dua point dari sebelumnya 6,3% pada 2007 menjadi 6,1% pada tahun 2008. Atau meleset Sembilan point dari proyeksi sebelumnya yaitu 7% pertahun.

Bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam menanggulangi dampak resesi ekonomi global sehingga terjadi peningkatan investasi asing langsung (FDI) yang masuk di Indonesia pada tahun 2008?

Pada penulisan skripsi ini, untuk dapat mendiskripsikan objek penelitian maka penulis menilai ada beberapa pendekatan yang mampu dijadikan landasan teori untuk menjawab pertanyaan utama dalam penelitian ini.

Pertama, penulis menggunakan pendekatan *Hipotesis Instabilitas Finansial (HIF)* oleh Hyman P. Minsky. Penggunaan pendekatan ini bertujuan untuk memahami secara mendasar latarbelakang terjadinya krisis finansial di AS yang berimbas pada resesi global. Pada dasarnya HIF memandang krisis/resesi finansial bersumber dari faktor endogen (internal) sistem ekonomi/kapitalisme. Internasionalisasi pasar finansial dimana intensitas perputaran modal semakin mudah dengan hadirnya perangkat teknologi maupun lembaga-lembaga sekuritas. Kemajuan teknologi mendorong pasar finansial maju begitu pesat. Eksperimen dan inovasi kemudian menjadi hal dominan. Hasilnya, sejalan dengan pendapat Minsky, bahwa Instabilitas merupakan faktor endogen.

Kedua, Penulis menggunakan pandangan *John Maynard Keynes tentang Intervensi Pemerintah dalam ekonomi*. Pandangan Keynes berpendapat bahwa dalam keadaan krisis (unequilibrium) maka dibutuhkan campur tangan atau intervensi pemerintah untuk mendinamiskan ekonomi kembali pada titik equilibrium lewat kebijakan (strukturisasi, regulasi atau deregulasi). Fungsinya untuk menstabilkan sektor finansial dan mendorong pertumbuhan sektor riil.

Jadi, kedua pendekatan di atas memiliki relasi yang cukup sinergis dalam menjelaskan objek penelitian. Pendekatan HIF (Minsky) menjelaskan faktor terjadinya krisis finansial AS yang kemudian berdampak pada resesi ekonomi global. Situasi tersebut menghadirkan respon beragam dari berbagai Negara.

Pada umumnya banyak Negara mengadopsi pandangan Keynes (Intervensi Pemerintah) hal ini mengandung dua tujuan mendasar yaitu stabilitas ekonomi dan perkembangan ekonomi sektor riil, termasuk investasi asing langsung (FDI). Tujuannya adalah menciptakan lapangan kerja sehingga pertumbuhan ekonomi Negara kembali stabil dan dinamis.

Komitmen Negara dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi termasuk dari sektor riil merupakan sinyal positif bagi investor, menjadikan investor tertarik dalam berinvestasi. Dalam berinvestasi, investor menerapkan hukum ekonomi klasik yaitu untuk mendapatkan keuntungan yang optimal agar selanjutnya dapat melakukan ekspansi ke sektor lainnya. Penulis menilai kedua pendekatan di atas mampu menjelaskan fenomena resesi ekonomi global dan perkembangan FDI di Indonesia tahun 2008.

Krisis ekonomi AS dan resesi ekonomi global ternyata tidak berdampak negatif terhadap perkembangan arus investasi asing langsung (FDI) di Indonesia pada tahun 2008. Realisasi investasi asing langsung (FDI) di Indonesia pada tahun 2008 tumbuh positif dikarenakan ketepatan pemerintah dalam mengantisipasi dampak resesi global sehingga menghadirkan sentiment positif investor untuk tetap merealisasikan investasinya di Indonesia. Pemerintah juga mampu memberi kepastian hukum yang pro-pasar (investasi) dan menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri, sehingga para investor yakin untuk merealisasikan investasinya atau tetap memilih berinvestasi di Indonesia.

Implikasi intervensi (kebijakan-regulasi) yang diterbitkan pemerintah cukup mampu menciptakan kepercayaan bagi investor untuk merealisasikan investasinya di

Indonesia. Perkembangann Investasi Asing Langsung (FDI) seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya mengalami peningkatan, meski domestik sangat rentan terhadap bahaya krisis finansial global.

Kepercayaan investor tersebut tidak datang tiba-tiba, seiring kebijakan yang dibuat pemerintah, melainkan ketepatan kebijakan yang menjadi faktor utama yang mendorong terciptanya stabilitas ekonomi domestik, sehingga investor yakin untuk tetap merealisasikan investasinya. Secara umum ada tiga faktor utama yang dapat dijadikan landasan terciptanya stabilitas ekonomi domestik. Faktor tersebut antara lain:

*Pertama*, Kepastian hukum. Aspek kepastian hukum sudah menjadi “harga mati” bukan hanya untuk investor tetapi juga untuk pelaku ekonomi secara umum. Hukum menjadi aturan yang berfungsi untuk mengatur dan mengawasi berjalannya kegiatan ekonomi. Keterlambatan dalam pengupayaan penerbitan hukum akan juga berdampak pada keterlambatan kegiatan ekonomi. Atau pada tataran yang paling ekstrim, pelanggaran hukum dapat menjadi celah untuk melakukan tindakan “curang” yang hanya menguntungkan segelintir orang. Masuknya Indonesia pada organisasi-organisasi perdagangan dunia baik secara regional maupun multilateral seperti GATT, AFTA, WTO, memuat konsekuensi deregulasi dan restrukturisasi. Artinya dalam ekonomi, ”doktrin” *invisible hand* menjadi luntur dan peran pemerintah tetap dibutuhkan bukannya dalam keadaan krisis namun juga dalam keadaan stabil.

Pemerintah Indonesia merespon resesi ekonomi glbal dengan menerbitkan beberapa peraturan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan meredam dampak

negatif krisis global tersebut. Bila dipehatikan dengan seksama keseluruhan paket kebijakan yang di keluarkan pemerintah tersebut secara hirarkis hukum tata negara merupakan produk dari eksekutif. Hal tersebut dapat menjadi salah satu indikasi kuat intervensi pemerintah dalam ekonomi, mengingat pada umumnya kebijakan pemerintah memerlukan legitimasi (persetujuan) dari parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai legislator.

*Kedua*, Kecukupan dan keamanan modal. Kegiatan ekonomi yang meliputi produksi, distribusi dan konsumsi sangat bergantung pada kecukupan modal. Bila modal berkurang akan berpengaruh pada minimnya pembiayaan ekonomi. Selain itu, dana yang telah tersimpan atau “mampir” di bank atau dalam bentuk surat berharga lainnya membutuhkan jaminan keamanan. Bila sewaktu-waktu krisis perbankan akan memicu penarikan nasabah secara bersamaan, hal tersebut akan sangat menyulitkan lembaga intermediasi ekonomi seperti yang pernah terjadi pada tahun 1997 lalu.

Modal tersebut pada umunya akan disalurkan dalam bentuk kredit ke pihak ketiga. Kredit dapat berupa kredit usaha atau kredit konsumsi. Investor juga sangat memperhatikan sirkulasi kredit tersebut, karena kredit usaha atau kredit konsumsi dapat menjadi salah satu indikator perkembangan ekonomi. Bila kredit usaha berjalan lancar artinya produktifitas masyarakat meningkat, hal ini akan berimbas pada peningkatan daya beli dan nilai simpanan masyarakat yang juga ikut meningkat. Itu adalah peluang bagi investasi asing langsung (FDI) untuk mengakses permodalan yang bersumber dari dalam negeri dan juga untuk peningkatan daya serap pasar domestik karena produktifitas, pendapatan dan daya beli masyarakat yang meningkat.

Selain dari lembaga intermediasi ekonomi, ada juga indikator kecukupan dan keamanan modal yang bersumber dari pemerintah yaitu cadangan devisa. Cadangan devisa Indonesia naik dari USD.42,6 miliar pada tahun 2006 menjadi USD.56,9 miliar pada 2007, bahkan pada Maret 2008 telah mencapai USD.60 miliar. Cadangan devisa yang besar serta lembaga intermediasi yang sehat dapat membuat investor semakin yakin untuk merealisasikan investasinya di Indonesia.

*Ketiga*, Daya beli pasar domestik. Di tengah melesunya permintaan pasar internasional (ekspor) membuat pasar domestik menjadi sasaran potensial. Indonesia dengan sekitar 230 juta jiwa merupakan pasar yang sangat potensial. Ini adalah peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah untuk dapat mengelola dan menatanya. Meski ditopang oleh jumlah penduduk yang besar, pasar domestik tidak serta-merta dapat menjadi sasaran utama.

Keunggulan pasar domestik sangat tergantung pada daya beli masyarakat. Sedangkan daya beli masyarakat sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatannya. Karena pada satu sisi, penurunan ekspor berdampak pada pelemahan industri orientasi ekspor, sehingga pendapatannya menurun dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk menekan biaya produksi dan tetap bertahan sembari melihat potensi pasar domestik.

Pendapatan riil per kapita meningkat dari Rp.8.319.000 pada tahun 2006 menjadi Rp.8.725.000 pada tahun 2007. Di sektor ketenagakerjaan tingkat pengangguran terbuka menurun dari 10,3% (10,9 juta orang) pada tahun 2006 menjadi 9,1 persen (10,0 juta orang) pada tahun 2007. Sedangkan jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 2,1 juta orang pada tahun 2008.



Berdasar pada indikator-indikator tersebut, maka cukup beralasan bila pasar domestik menjadi primadona investor untuk menjual hasil industrinya, meski perlu disadari terjadi penurunan kapasitas produksi (pendapatan perusahaan) disebabkan lesunya permintaan pasar internasional (ekspor). Ketiga point tersebut menurut penulis merupakan faktor-faktor cukup penting yang menciptakan stabilitas ekonomi, terutama terkait komitmen dan perkembangan realisasi investasi asing langsung (FDI) Indonesia tahun 2008.